

**RENCANA KERJA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT  
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI  
(RENJA) T.A. 2024**

---

**I. Latar Belakang**

**1. Kondisi Umum**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada periode kepemimpinan 2021-2024 telah menetapkan *tagline* “Transformasi Menuju Polri Yang Presisi” (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan). Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari kepemimpinan Polri sebelumnya dengan pendekatan pemolisian berorientasi masalah (*Problem Oriented Policing*). Dalam kepemimpinan POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (*predictive policing*) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan Kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin. Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara mampu melaksanakan tugasnya secara cepa dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.

Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup baik dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus yang menjadi perhatian publik, kodusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada masyarakat, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri ada juga hal-hal yang justru menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, hal ini menunjukkan bahwa Polri sangat dicintai oleh masyarakat, sehingga Polri bisa memperbaiki dan selalu berbenah untuk keprofesionalan dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan

kasus yang menjadi perhatian publik, khususnya tindak pidana terorisme, Siber, Narkoba Korupsi maupun kejahatan Transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai oleh Polri tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri dengan didukung oleh eksklusif, legislatif, yudikatif dan partisipasi masyarakat serta berbagai *stakeholders* yang terkait dengan tugas kepolisian. Se jauh ini apresiasi yang positif atau kritik terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa mendatang.

Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai tantangan dimasa mendatang. Tantangan tersebut berupaya adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat dibidang kepolisian.

Dalam rangka Rencana Kerja di tahun 2024, Polri telah menyusun Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri T.A. 2024, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024. Dalam Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri T.A. 2024, terdiri dari 6 Sasaran Prioritas, 5 Program dan 99 Kegiatan. Selain itu penyusunan Rancangan Rencana Kerja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Rancangan Rencana Kerja (Rarenja) Polri T.A. 2024 memuat arah kebijakan dan Strategi demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana, sistematis dan tanggap akan perubahan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Polri T.A. 2024 sejalan dengan Program Prioritas Kapolri dalam Transformasi Menuju Polri Yang Presisi guna mendukung mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu. Pedoman Perencanaan (Domren) Kapolri T.A. 2024 mengacu kepada RPJMN Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja (Renja) Polda Jambi T.A. 2024 mengakomodir:

- a. Domren Kapolri T.A. 2024 sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Pilar keamanan dalam negeri yang akan dicapai dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- c. Prediksi ancaman yang diperkirakan menjadi potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat pada tahun 2024;
- d. Sasaran Prioritas Polri Tahun 2024;
- e. Arah Kebijakan untuk mewujudkan Sasaran Prioritas Tahun 2024;
- f. Program dan Kegiatan Polri Tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja Polda Jambi T.A. 2024 juga memperhatikan dan mempertimbangkan semua isu strategis baik global, regional dan nasional sebagai bahan masukan. Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polda Jambi yang dipengaruhi oleh perubahan perubahan dan perkembangan lingkungan strategis global tersebut akan digambarkan sebagai berikut:

- a. Perkembangan Aspek Kehidupan
  - 1) Global

Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan dipengaruhi pada tataran global dan regional yang sangat kompleks baik itu kepentingan politik strategis, energi dan sumber daya alam maupun pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah memicu ketegangan antar negara bahkan konflik terbuka atau perang yang akan berpengaruh pada kebijakan banyak negara di dunia termasuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menciptakan ketahanan dan situasi keamanan dalam negeri.

Perkembangan aspek global merupakan perkembangan isu-isu global yang akan terus menerus mewarnai, mempengaruhi dan

memberikan dampak terhadap lingkungan strategis saat ini, yaitu antara lain : fluktuasi harga minyak dunia, perubahan iklim, krisis ekonomi, dominasi negara maju, dinamika / politik dan keamanan internasional, tuntutan demokratisasi dan Hak Asasi Manusia, serta perubahan kekuatan dunia yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan yang berubah secara dinamis, spesifik dikemukakan sebagai berikut :

- a) Perkembangan dunia teknologi yang semakin masif telah membawa perubahan yang besar dan signifikan bagi kehidupan manusia terlebih saat ini dunia telah memasuki dunia digital 5.0 dan industri 4.0 atau sistem otomatisasi industri dimana semua kegiatan dan aktivitas, komputasi kognitif dan aktifitas lain berbasis jaringan sehingga memudahkan aktifitas manusia dalam menggerakkan perekonomian. Selain itu masifnya penggunaan teknologi dikalangan masyarakat juga membawa dampak sosial dimana mudahnya pertukaran informasi yang kadang kala sering dimanfaatkan untuk menyebarkan hoaks, alat propaganda dan lain-lain terutama media sosial yang sering berujung menjadi aksi kejahatan dan konflik bahkan dimanfaatkan untuk rekrutmen jaringan terorisme maupun radikalisme.
- b) Amerika masih dianggap sebagai negara adidaya dan mempengaruhi banyak kendali atas keamanan negara-negara didunia meskipun saat ini muncul kekuatan baru yang menjadi saingan berat Amerika dari berbagai bidang terutama ekonomi dan kekuatan militer. Agresi dan invasi militer yang dilakukan oleh Amerika ke sejumlah negara dengan berbagai alasan politik sering menimbulkan ketegangan antar negara dan bahkan berdampak pada keamanan negara kawasan. Setiap kebijakan politik Amerika digunakan untuk melindungi negara dan sekutunya meskipun banyak negara yang berkonflik dengan Rusia namun juga dengan China, Korea Utara, Iran, Taliban dan Al-Qaeda di Afganistan ISIS di Suriah dan

sejumlah negara lainnya yang mengancam keamanan Amerika dan sekutunya terutama terkait dengan persaingan perdagangan dan militer;

- c) Invasi Rusia ke Ukraina sejak tanggal 24 Februari 2022 telah membawa dampak signifikan terhadap dunia internasional, hal tersebut akibat ketegangan antara Rusia dengan Amerika bersama sekutunya yang terus meningkat dan saling mengancam. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas sejak 2014 ketika munculnya revolusi menentang supremasi Rusia serta munculnya revolusi menentang supremasi Rusia serta munculnya pemberontakan di wilayah Ukraina Timur yakni Donetsk dan Luhansk yang kemudian pada tanggal 21 Pebruari 2022 kedua wilayah tersebut resmi memerdekakan diri dan diakui oleh Rusia. Pihak Rusia tidak ingin Ukraina yang merupakan negara pecahan Uni Soviet bergabung dengan blok barat yang dipimpin Amerika dengan kekuatan militer NATO. Pihak Rusia mengkhawatirkan Ukraina yang berada di perbatasan Rusia bergabung dengan NATO dan mengancam keamanan Rusia dan negara-negara pecahan Uni Soviet. Perang Rusia dengan Ukraina telah membawa dampak sangat besar bagi perekonomian global. Invasi Rusia ke Ukraina telah mengakibatkan banyak korban jiwa lebih dari 7 juta warga ukraina meninggalkan negaranya untuk mengungsi kenegara lain. Untuk menekan dan mencapai lebih dari 5.530 sanksi, namun Rusia tidak mau terpengaruh dengan sanksi tersebut dan tetap melakukan serangan terhadap Ukraina dengan target melumpuhkan fasilitas militer Ukraina dan melengserkan Presiden Ukraina Volodymyr Oleksandrovykh Zelenskyy meskipun banyak negara di dunia mengecam tidakan invasi Rusia ke Ukraina;
- d) Meningkatnya eskalasi ketegangan yang menimbulkan potensi konflik di kawasann Indo-Pasifik membuat Indonesia sebagai

salah satu negara yang memiliki letak geografis di kawasan Indo-Pasifik merasakan ancaman yang nyata terhadap keamanan kedaulatan negara Indonesia. Amerika Serikat yang merasa terancam dengan bangkitnya China yang muncul sebagai pemain global membuat Amerika mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah adanya hegemoni China di dunia. China sendiri telah melakukan sebuah klaim sepihak terhadap Laut China Selatan yang membuat Amerika dan berbagai negara geram dengan adanya klaim ini;

China memperingatkan bahwa strategi Amerika Serikat dan sekutunya di Indo-Pasifik berpotensi menimbulkan bahaya. Ancaman itu sama dengan ekspansi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) ke Eropa timur yang dinilai telah memicu konflik Rusia-Ukraina. China mengklaim sejumlah negara kini menentang terbentuknya strategi Indo-Pasifik itu yang tertutup dan eksklusif, mengarahkan kawasan itu terpecah dan terbagi berdasarkan blok-blok. Disisi lain Amerika dan negara barat sangat kecewa dengan sikap China yang tidak segera meminta Rusia untuk mengakhiri serangan militer terhadap Ukraina.

## 2) Regional

Perkembangan aspek kehidupan regional merupakan perkembangan isu-isu regional yang akan terus menerus mewarnai, mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap lingkungan strategis saat ini yaitu antara lain : konflik politik dan keamanan dikawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan negara baik perbatasan darat, laut dan udara, kerjasama antara negara Asean dibidang ekonomi, pertahanan dan keamanan yang secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap perkembangan kehidupan negara. Isu-isu strategis tersebut yaitu sebagai berikut :

- a) Kawasan Asia Pasifik merupakan pusat gravitasi keamanan global, kawasan ini merupakan kawasan paling strategis di dunia.Keamanan Internasional secara umum sangat ditentukan

oleh bagaimana dinamika dan interaksi keamanan di kawasan ini. Kawasan Asia Pasifik juga merupakan kawasan yang paling dinamis pertumbuhan ekonominya. Posisi strategis tersebut menjadikan Asia Pasifik menjadi pusat aktivitas yang penting dalam pencatutan politik global;

- b) Persaingan China dengan Amerika baik dalam bidang ekonomi dan militer telah membuat pengaruh besar bagi dunia dan keamanan negara-negara kawasan. China merupakan ancaman terbesar Amerika di kawasan Asia Pasifik dimana China sebagai kekuatan terbesar yang muncul di Asia Kawasan Pasifik, peningkatan kekuatan China dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakamanan di Asia Pasifik. Kebangkitan China dalam berbagai bidang menjadikannya sebagai mitra utama perdagangan di kawasan, menyalip Jepang dan Amerika Serikat. Cina juga memodernisasi kekuatan militernya untuk menunjukkan kekuatannya di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan utama dalam bidang ekonomi serta signifikan di dalam kekuatan militer, China bersiap ingin melepas pengaruh akan politik dan kekuasaan Amerika Serikat yang telah mempertahankan pola dalam tatanan global setelah perang dingin. Mengamati dari pertumbuhan China dan Amerika Serikat harus melestarikan ruang lingkup serta pengaruhnya telah mereformasi strategi pertahanan dan memuaskan sumber dayanya di seluruh Asia Pasifik. Pembentukan AUKUS oleh Amerika yang beranggotakan Inggris, Australia dan Amerika merupakan manifestasi revalitas Amerika merupakan dengan China/Tiongkok di kawasan Asia-Pasifik melalui strategi Indo-Pasifiknya. Terkait keamanan kawasan bahwa China sebelumnya menuduh Amerika berusaha menciptakan aliansi mirip NATO di kawasan Asia-Pasifik melalui strategi Indo-Pasifiknya. China sangat kritis terhadap kelompok yang

dipimpin Amerika seperti Quad dan pakta AUKUS trilateral melibatkan Amerika, Australia dan Inggris;

- c) Di Asia Tenggara, Amerika Serikat telah mulai menopang sekutunya berhadapan dengan China. Amerika merupakan mitra perekonomian dan keamanan utama bagi kebanyakan negara di Asia Tenggara dan bersekutu dengan Thailand dan Filipina serta memiliki kerjasama pertahanan dengan Singapura dan Vietnam salah satu rekan utama mereka di Asia saat ini. Amerika juga mendukung Vietnam, Malaysia, dan Indonesia dalam sengketa wilayah Laut China Selatan dengan China;
- d) China adalah ekonomi dominan dan mitra dagang utama bagi banyak negara, tetapi persaingan dengan AS semakin buruk. China telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan pakta perdagangan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) dimana Jepang, Taiwan, Australia, Singapura, dan Selandia Baru adalah anggota CPTPP dimana negara-negara tersebut adalah sekutu dari Amerika, sementara Amerika beberapa tahun lalu telah mencabut diri dari keanggotaan pakta tersebut;
- e) Adanya pergeseran perhatian politik dunia dari Trans Atlantic ke Trans Pasifik. Di pasifik sendiri telah berdiri 2 blok perdagangan yang masing-masing berafiliasi ke Amerika Serikat dan Tiongkok, netralitas ASEAN dan negara-negara anggotanya dalam blok perdagangan di Asia Pasifik menjadikan ASEAN semakin strategis dan menguntungkan bagi negara anggota;
- f) Indonesia resmi menjabat sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2013. Indonesia optimisme bahwa ASEAN akan tetap relevan serta menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang penting di kawasan ASEAN, mengarahkan kerja sama ASEAN tahun 2023 untuk melanjutkan dan memperkuat relevansi ASEAN

dan merespon tantangan dan global serta memperkuat posisi ASEAN sebagai pertubuhan negara dengan memperkuat di bidang kesehatan, bidang energi, bidang pangan, dan penguatan untuk kerjasama keuangan;

- g) Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN semakin memperkuat soliditas dan sentralitasnya di kawasan melalui kesepakatan mengintegrasikan negara-negara ASEAN dalam sebuah Komunitas ASEAN berdasarkan piagam ASEAN yang berlaku pada awal tahun 2009. Keberhasilan ASEAN secara dapat memainkan peran sentral (*In The Diving Seat*) dalam proses integrasi kawasan yang berlagsung dinamis;
- h) Krisis politik Malaysia 2 tahun terakhir hingga 2022 masih terus bergulir berbagai gejolak politik muncul sejak mantan Perdana Menteri Mahatir Mohammad mundur dan digantikan oleh mantan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin kemudian Muhyiddin yang kehilangan dukungan mayoritas di parlemen menghadapi mosi tidak percaya hingga akhirnya ia digantikan oleh Ismail Sabri (perdana menteri pertama dari UMNO yang bukan presiden partai). Sebelum lengser Perdana Menteri Muhyiddin berkomitmen untuk menggelar Pemilu Raya Umum ke-15 paling lambat pada Juli 2022, namun pemerintah Ismail Sabri menyebut Pemilu Raya Umum-15 tidak akan digelar sampai tahun 2023;
- i) Singapura dan Indonesia pada 25 Januari 2022 telah menandatangani perjanjian ekstradisi yang sudah diperjuangkan selama 2 dekade dimana Indonesia mengizinkan Singapura menggelar latihan tempur 4 kali dalam di barat daya Kepulauan Natuna untuk menangkal ancaman konflik di Laut China Selatan dan sebagai gantinya Singapura setuju membatasi haknya mengakses kawasan udara di Kepulauan Riau antara lain dengan menyerahkan zona pengawasan bagi penerbangan komersil di sebagian wilayah Riau dan

Kalimantan ke Indonesia. Kerjasama kedua negara juga akan menjadi akselerasi progresif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dimana Indonesia dapat lebih mudah menangkap koruptor yang sering bersembunyi di Singapura maupun mempermudah proses pemulangnya;

- j) Masalah isu *Melanesian Brotherhood* (persaudaraan Melanesia) digunakan sebagai strategi penyusunan kekutan negara-negara di Pasifik Selatan yang berpengaruh untuk mendukung gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh OPM di Vanuatu dalam organisasi *West Papuan Peoples Representative (WPPRO)* dan aktif melakukan kegiatan propaganda kemerdekaan Papua;
- k) Kelompok separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka) memanfaatkan wilayah Papua New Guinea (PNG) untuk dijadikan tempat bersembunyi dan berlindung untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia. Kawasan selat Torres sering digunakan oleh kelompok tertentu melakukan penyelundupan senjata dari Australia melalui ke PNG untuk kemudian ditukarkan dengan Narkoba dan minuman keras;
- l) Banyak negara di Pasifik Selatan menghadapi masalah lingkungan karena sempitnya lahan untuk hidup dan bersikap pragmatis. Sebagian penduduknya melakukan migrasi ke berbagai negara tetangga, seperti Australia dan Indonesia bagian timur. Wilayah air mereka banyak disewakan pihak asing. Kegiatan-kegiatan mereka tidak dapat dikontrol berakibat meningkatnya kejahatan transnasional seperti Narkoba dan pencucian uang (money laundering) berimplikasi terhadap keamanan wilayah Indonesia di bagian timur;

m) Kondisi ekonomi masyarakat di Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) sampai saat ini masih bergantung negara lain, sehingga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kasus penyelundupan barang-barang komoditi ke negaranya. Hubungan diplomatik Indonesia dengan RDTL terdapat permasalahan perlu diselesaikan, seperti adanya keberatan masyarakat perbatasan merasa menguasai/memiliki tanah secara turun-temurun dimasukan wilayah RDTL.

### 3) Nasional

Perkembangan aspek kehidupan nasional merupakan perkembangan isu-isu nasional yang akan terus menerus mewarnai, mempengaruhi dan memberikan dampak terhadap lingkungan strategis saat ini yaitu antara lain : posisi silang Indonesia yang strategis membawa peluang bagi perkembangan perekonomian nasional dan kawasan Asia Pasifik sekaligus mengandung ancaman kriminalitas yang bersifat transnasional, penyebaran penduduk yang tidak merata secara kualitas dan kuantitas menjadi kendala dalam akselerasi pembangunan nasional, eksplorasi dan eksploitasi alam yang tidak memperhatikan prinsip pemeliharaan lingkungan hidup, euforia pada fenomena kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat mengarah kepada serba boleh dan mengabaikan aturan hukum yang berlaku, tuntutan perlindungan hak asasi manusia dan tuntutan masyarakat terhadap terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN berpotensi menjadi sumber ancaman dan gangguan keamanan dalam negeri Indonesia, yang secara spesifik dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### a) Aspek Geografi

- (1) Indonesia terletak di antara 6° LU-11°LS dan 95° BT-141° BT, antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindi, antara benua Asia dan Australia serta dua Samudra yaitu Samudra

Indonesia dan Samudra Pasifik berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara yakni Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, India, Thailand, Vietnam dan Republik Palau yang mempunyai potensi kerawanan masalah perbatasan baik masalah pada perbatasan darat, laut dan udara;

- (2) letak Geografis Indonesia berada pada kawasan Lempeng Indo Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik yang rawan berpotensi terjadinya bencana gempa bumi dan bencana Tsunami khususnya Pantai Barat Sumatera, Selatan Jawa, Selatan Nusa Tenggara, Maluku dan Pantai Utara Papua, disamping banyaknya gunung berapi yang rawan dan berpotensi terjadinya bencana gunung meletus, bahaya banjir pada musim penghujan dan bencana kekeringan diberbagai daerah di musim kemarau;
- (3) dilihat dari letak garis bujurnya, wilayah Indonesia terletak di antara  $95^{\circ}$  BT dan  $141^{\circ}$  BT. Ini berarti batas paling barat wilayah Indonesia adalah  $95^{\circ}$  BT paling timur adalah  $141^{\circ}$  BT. Jarak bujurnya ialah  $46^{\circ}$  (ekitar 5000 km, atau hampir  $1/8$  keliling bumi). Perbedaan garis bujur sedemikian tersebut menyebabkan adanya perbedaan waktu perbedaan waktu sekitar 3 jam ( yang lebih tepatnya  $46 \times 4$  menit = 184 menit) antara bagian paling timur dengan bagian paling barat Indonesia;
- (4) Letak astronomi Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia terletak di daerah iklim tropika. Daerah iklim tropika terdapat di antara  $23.5^{\circ}$  LU atau Garisan Sertan, dan  $23,5^{\circ}$  LS atau Garisan Jadi. Hal ini mengakibatkan suhu di Indonesia cukup tinggi (antara  $26^{\circ}\text{C}$ - $28^{\circ}\text{C}$ ), curah hujan cukup banyak (antara 700 mm-7000mm per tahun), terdapat hujan zenital (hujan naik khatulistiwa), proses

pelapukan batu-batuan cukup cepat serta terdapat berbagai jenis spesies hewan dan tumbuhan;

- (5) Krisis iklim di Indonesia memperparah bencana banjir dan longsor, frekuensi bencana hidrometeorologi di Indonesia terus meningkat. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah kejadian bencana hidrometeorologi terbesar ketiga di seluruh dunia. Salah satu penyebabnya adalah anomali iklim karena peningkatan suhu global. Penyebab peningkatan suhu tahunan bumi ialah konsentrasi gas rumah kaca yang kian tinggi. tren suhu global yang berimbas pada banyaknya bencana terpantau terus meningkat. Bencana hidrometeorologi erat kaitannya dengan anomali atmosfer. Jenis bencana ini meliputi banjir, longsor, tornado, siklon, dan kekeringan. Berdasarkan data NASA suhu rata-rata permukaan bumi mengalami lonjakan yang besar. Bahkan tahun 2022 menjadi salah satu tahun terpanas secara global. Sebelum tahun 2000-an, kenaikan suhu rata-rata masih dibawah 0,5 derajat celcius secara global. Namun kini angkanya terus meningkat hingga 1 derajat celcius;
- (6) Kondisi topografi Indonesia yang bergunung, berlembah, serta banyak kawasan pesisir, merupakan kondisi geografis yang berkontribusi terhadap fenomena iklim lokal dan menambah beragamnya kondisi iklim di wilayah Indonesia baik menurut ruang (wilayah) maupun waktu;
- (7) Posisi dan letak geografis Indonesia menyebabkan Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang menguntungkan sebagai berikut:
  - (a) Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional;
  - (b) Indonesia memiliki iklim tropika;
  - (c) Kondisi vegetasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia sangat beragam dengan keragaman flora dan fauna di Indonesia;

- (d) Adanya pembagian tiga daerah waktu di Indonesia.
- (8) Keragaman jenis tanah di Indonesia akibat pengaruh dari letak dan posisi geologis bagi Indonesia, antara lain:
- (a) Indonesia dilalui rangkaian gunung api aktif;
  - (b) Indonesia rawan akan terjadinya gempa bumi tektonik;
- (9) Kondisi geografis wilayah Indonesia yang masuk dalam Sabuk Api Pasifik (*Ring Of Fire Pacific*) dan Sabuk Alpine, menjadikan Indonesia rawan terjadinya bencana gempa bumi Vulkanik. Selain hal tersebut di atas Indonesia dikelilingi oleh lempengan-lempengan Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Hal tersebut menjadi penyebab rawan terjadinya Bencana Gempa Bumi Tektonik, apabila lempengan-lempengan itu bergeser, patah, atau bahkan terjadi tumbukan. Namun dengan kondisi tersebut Indonesia memiliki bahan mineral tambang melimpah;
- (10) Kondisigeografis wilayah Indonesia yang berbatasan langsung maupun tidak langsung (darat dan perairan laut) dengan negara tetangga, sebagai jalur keluar masuknya terorisme dan pelaku kriminalitas transnasional, termasuk pencurian ikan di perairan wilayah Indonesia;
- (11) Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat bagi masyarakat pedalaman, namun dalam perkembangannya berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana pelaku penyelundupan barang, penyelundupan kayu (*Illegal Logging*) dan jalur peredaran gelap Narkoba. Sungai-sungai di Indonesia juga menjadi lahan tambang emas ilegal menggunakan bahan kimia merkuri yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

b) Aspek Demografi

- (1) Berdasarkan Data Kependudukan pada Semester I tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia saat ini berjumlah ± 275.361.267 jiwa per juni 2022, terdiri dari 138.999.996 penduduk laki-laki atau 54,48% dan 136.361.271 penduduk perempuan atau 49,52%, berdasarkan piramida penduduk, saat ini Indonesia didominasi oleh penduduk kategori produktif, yakni usia 15-64 tahun sebanyak 190.827.224 jiwa atau 69,30%. Penduduk kategori usia muda, 0-14 tahun mengisi sebanyak 67.155.629 jiwa atau 24,39%. Sisanya kategori penduduk usia tua, 65 tahun ke atas sebanyak 17.374.414 jiwa atau 6,31%. Adapun jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 88.929.047;
- (2) Provinsi Jawa Barat masih berada di posisi nomor satu, yakni berpenduduk sebanyak 48.637.180 jiwa. Adapun tingkat kabupaten atau kota penduduk terbanyak berada di Kabupaten Bogor, jumlahnya 5.385.219 jiwa, Kalimantan Utara tergolong penduduk paling sedikit, yakni 709.620 jiwa. Kabupaten Supiori, Papua masuk dalam penduduk paling sedikit tingkat Kabupaten atau Kota, berjumlah 25.015 jiwa;
- (3) Pulau Jawa dengan luas 6,8% ditempati lebih dari setengah penduduk Indonesia yaitu 57,5% penduduk, sementara Kalimantan dengan luas 28,5% Indonesia hanya ditempati oleh 5,8% penduduk, Sumatera yang luasnya 25,2% dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3% penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9% dihuni oleh 7,3% penduduk, Maluku yang luasnya 4,1% dihuni oleh 1,1% penduduk dan Papua yang luasnya 21,8% dihuni oleh 1,5% penduduk;

- (4) Luas wilayah Indonesia sekitar 1.916.906.77 km<sup>2</sup>, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Indonesia sebesar 147 orang per km<sup>2</sup>. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak ke empat di dunia, Indonesiaberhadapan dengan masalah pertambahan jumlah penduduk cepat, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Kondisi tersebut menjadi salah penyebab masalah konflik vertikal maupun horizontal, sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (5) Sebagai negara dengan jumlah pemeluk islam terbesar dan banyak aliran. Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan aksi teror.

c) Aspek Sumber Daya Alam

- (1) Wilayah Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alam mineral (emas, perak, biji besi, nikel, batubara, bauksit, mangan, tembaga), gas dan minyak bumi merupakan andalan pemasukan devisa negara dari sektor pertambangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan melalui Penanaman Modal Asing (PMA), dan oleh pihak swasta/asing baik dalam maupun luar negeri;
- (2) Bahan-bahan hasil tambang dan hasil bumi Indonesia, antara lain : tambang minyak bumi terdapat di Aceh

(Peureulak, Lhokseumawe), Sumut (Tanjungpura), Riau (Dumai, Sungai Paking), Sumsel (Sungai Gerong, Plaju), Kaltim (Sungai Mahakam, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu), Kalteng (Kembatin), Jatim (Delta Sungai Brantas), Jateng (Cepu), Jabar (Majalengka), Maluku (Pulau Seram, Pulau Tenggara), Papua (Sorong, Babo, Klamano). Sedangkan pabrik pengolahan minyak bumi terdapat di Sumut (Pangkalan Brandan), Sumsel (Plaju, Sungai Gerong), Jateng (Cepu, Cilacap), Kaltim (Balikpapan);

- (3) Hutan di Indonesia yang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi dan hutan suaka marga satwa telah memberikan andil yang besar sebagai produksi hasil hutan yang terbarukan dan dapat mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*), namun apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan tidak memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan rantai ekosistem maka akan berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan baik terhadap keberlanjutan flora dan fauna serta lingkungan lainnya sebagai akibat dari perambahan hutan yang tidak terkendali;
- (4) Batu Bara sebagai salah satu komoditas sumber daya minerla tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Yaitu Umbilin (Sawah Lunto Sumbar), Bukit Asam (Tanjung Enim Sumsel), Sungai Berau (Samarinda Kaltim), Kotabaru (Pulau Laut Kalsel), serta di beberapa daerah Papua, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur;
- (5) Sumber daya alam lainnya;
  - (a) Tambang biji besi terdapat di Lampung (Gunung Tegak), Kalsel (Pulau Sebuk, Pulau Suwang, Pulau Demawan), Sulteng (Pegunungan Verbeek, Longkana), Jabar (Cilegon), Jateng (Cilacap-Pasir Besi). Biji besi diolah PT Krakatau Steel di Cilegon

Jabar dan pasir besi diolah PN Aneka Tambang di Cilacap Jateng. Daerah penghasil biji besi lainnya di Kepulauan Maluku;

- (b) Tambang timah terdapat di Bangka (Sungai Liat), Pulau Belitung, Manggar), Pulau Singkep (Dabo) dan Riau (Bangkinang);
- (c) Tambang Bauksit terdapat di Pulau Bintan (Riau) dan Singkawang (Kalbar);
- (d) Tambang tembaga terdapat di Cikotok (Jabar), Kompara (Papua/Irja), Sangkar Api (Sulsel), tirta Maya (Jateng) juga terdapat di daerah Kalimantan Timur dan Aceh;
- (e) Tambang emas dan tambang perak di Meulaboh (Aceh), Logos (Riau), Rejang Lebong (Bengkulu), Bengkalis (Riau), Cikotok (Jabar), Bolaang Mongondow (Sulut), pabrik pengolahan emas terdapat di Cikotok (Jabar);
- (f) Tambang mangan terdapat di Kliripan (DIY), Tasikmalaya (Jabar);
- (g) Tambang belerang terdapat di Gunung Patuha (Jabar), Gunung Welirang (Jatim);
- (h) Tambang aspal terdapat di Pulau Buton (Sultra). Aspal juga dihasilkan oleh Permigran Wonokromo Jatim sebagai hasil pengolahan minyak bumi;
- (i) Tambang mika terdapat di Pulau peleng (Sulsel) dan Donggala (Sulteng);
- (j) Tambang asbes terdapat di Kuningan (Jabar), Pulau Seram dan Pulau Jalmahera (Maluku);
- (k) Tambang grafit terdapat di Payakumbuh dan Singkarak (Sumbar);
- (l) Bahan-bahan semen banyak terdapat di Indarung (Sumbar), Gresik (Jawa Timur), Sukabumi (Jabar), Laah Kulu (Kaltim), Tonasa (Sulsel);

- (m) Intan terdapat di Kalses, tempat penghasil/pengesahannya di Martapura;
- (n) Tambang yodium terdapat di Semarang (Jateng) dan Mojokerto (Jatim);
- (o) Tambang marmer terdapat di Besok daerah Wajak Tulung Agung Jatim;
- (p) Daerah penghasil Nikel adalah Kepulauan Maluku dan Sulawesi Tengah;
- (q) Fosfat banyak terdapat di Pangandaran (Jabar), Gombong, Purwokerto, Jepara, Rembang (Jateng) dan Bojonegoro (Jatim);
- (r) Fosfat merupakan persenyawaan kotoran kelelawar dengan batu kapur, digunakan dalam industri pupuk;
- (s) Gips terdapat di Cirebon, Rembang, dan Kalianget;
- (t) Garam batu terdapat di Kepulauan Kei;
- (u) Daerah penghasil garam di Pulau Madura;
- (v) Tras sejenis batu truf, banyak terdapat di Gunung Muria (Jateng) dan Daerah Priangan (Jabar).

d) Aspek Ideologi

- (1) Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang teguh ideologi kelompok atau golongan tertentu yang ingin mengubah ideologi negara dari Pancasila menjadi ideologi lain seperti yang diperjuangkan oleh kelompok radikal yang berbasis agama. Keberadaan kelompok radikal yang ingin mendirikan negara Indonesia berdasarkan Khilafah belakangan ini terus berkembang di Indonesia untuk menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ideologi Pancasila. Pemerintah telah membubarkan 2 ormas yakni Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang memiliki radikal yang tidak menganut ideologi Pancasila dan mendukung terbentuknya ideologi Khilafah serta

ditemukannya kelompok Negara Islam (NII) namun demikian mereka hanya bubar dalam organisasi resmi/legal akan tetapi orang-orang dan pemahaman radikal mereka masih melekat dan terus menyebar di tengah masyarakat bahkan menyusup ke dalam sendi-sendi pemerintahan dan aparat keamanan. Karopenmas Divisi Humas Polri pada April 2022 terdapat 1.125 orang anggota NII di Sumatra Barat di mana sekitar 400 orang diantaranya merupakan personel aktif selebihnya non aktif atau sudah berbaiat, namun belum aktif dan selebihnya non aktif dalam kegiatan NII dan sewaktu-waktu bisa diaktifkan kembali apabila perlu. Anggota NII tidak hanya tersebar di daerah Sumatera Barat tapi juga di DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali hingga Maluku;

- (2) Ideologi lainnya marak diisukan di Indonesia yang bahkan menjadi komoditi politik yakni ideologi komunis, dimana sekelompok masyarakat tertentu setiap tahunnya menggelorakan bahwa adanya kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) terutama menjelang peringatan pemberontakan G 30 S/PKI maupun menjelang Pemilu, bahkan ideologi tersebut kerap kali dituduhkan kepada pemerintah, bahkan kelompok radikal keagamaan pun menyuarakan isu kebangkitan komunis di Indonesia walaupun belum ada fakta maupun hasil penelitian yang menunjukkan bahwa adanya kebangkitan komunis di Indonesia;
- (3) Negara dan masyarakat Indonesia masih terus berjuang menegakan dan mempedomani ideologi Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa. Bahkan pemerintah juga membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan

standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. BPIP merupakan revitalisasi dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP). Selain itu pemerintah juga mengusulkan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila meskipun sampai saat ini masih berpolemik dan mendapat penolakan dari sejumlah pihak termasuk kelompok oposisi pemerintah sehingga pembahasannya ditunda oleh DPR RI.

e) Aspek Politik

- (1) Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 bahwa Pemilu presiden, Pemilu Legislatif dan pemilihan kepala daerah akan digelar pada tahun 2024. Pemerintah tetap konsisten menggelar Pemilu pada tanggal 14 Pebruari 2024 dimana tahapan Pemilu 2024 sudah akan dimulai pada bulan Juni 2022 dan presiden Joko Widodo telah melantik Komisioner KPU dan Bawaslu RI pada tanggal 12 April 2022 untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada 2024;
- (2) Pada awal tahun 2022 muncul isu dari kalangan elit politik dan menjadi perdebatan publik terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden, hal ini telah memicu prokontra bahkan aksi massa terutama dikalangan mahasiswa yang puncaknya pada tanggal 11 dan 21 April 2022 meskipun presiden Joko Widodo dan pihak pemerintah telah berulang kali menegaskan bahwa

tidak ada rencana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden;

- (3) Terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 juga menuai prokontra sehubungan dengan pengisian jabatan Kepala Daerah karena pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 akan memunculkan penjabat (Pj) Kepala Daerah di sejumlah daerah untuk menggantikan Kepala Daerah yang habis masa tugasnya pada 2022 dan 2023. Sebanyak 272 daerah masa jabatan Kepala Daerahnya akan habis dan akan dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Daerah yang dijabat lebih dari 1 tahun (tahun 2022 sebanyak 101 Kepala Daerah dan tahun 2023 sebanyak 171 Kepala Daerah);
- (4) Anggaran Pemilukadadan Pilkada 2024 sampai awal bulan Mei 2022 belum disahkan namun presiden Joko Widodo telah mengumumkan perkiraan anggaran pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mencapai Rp. 110,4 triliun anggaran tersebut akan dialokasikan sebesar Rp. 76,6 triliun untuk KPU dan Rp. 33,8 triliun untuk Bawaslu;
- (5) Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Menjelang Pemilu 2024 masih muncul prokontra masalah ambang batas parlemen dan pencalonan presiden. Ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur ambang batas parlemen (*parlementary treshold*) sebesar 4% sedangkan ambang batas pencalonan Presiden (*Presiden Treshold*) sebesar 20% menjadi 0% agar semua partai politik mempunyai kesempatan untuk mengusung calon presidennya masing-masing. Tahapan dan jadwal Pemilu

tahun 2024 berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2022, sebagai berikut:

- (a) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu tanggal 29 Juli 2022-13 Desember 2022;
- (b) Penetapan peserta Pemilu tanggal 14 Desember 2022;
- (c) Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan tanggal 14 Oktober 2022 – 9 Februari 2022;
- (d) Pencalonan anggota DPD tanggal 6 Desember 2022 – 25 November 2023;
- (e) Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tanggal 24 April 2023 – 25 November 2023;
- (f) Pencalonan presiden dan wakil presiden tanggal 19 Oktober 2023 – 25 November 2023;
- (g) Masa kampanye Pemilu tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024;
- (h) Masa tenang tanggal 11 Februari 2024 – 13 Februari 2024
- (i) Pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024;
- (j) Penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024 – 15 Februari 2024;
- (k) Rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 15 Februari 2024 – 20 Maret 2024;
- (l) Penetapan hasil Pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK);
- (m) Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD tanggal 1 Oktober 2024;
- (n) Pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober 2024.

Tahapan dan jadwal Pemilu presiden dan wakil presiden jika 2 putaran :

- (a) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih tanggal 22 Maret 2024 – 25 April 2024;
  - (b) Masa kampanye Pemilu tanggal 2 Juni 2024 – 22 Juni 2024;
  - (c) Masa tenang tanggal 23 Juni 2024 – 25 Juni 2024;
  - (d) Pemungutan suara tanggal 26 Juni 2024;
  - (e) Penghitungan suara tanggal 26 Juni 2024 – 27 Juni 2024;
  - (f) Rekapitulasi hasil pemungutan suara tanggal 27 Juni 2024 – 20 Juli 2024.
- (6) Pada Pemilu Legislatif tahun 2019 dari 14 partai politik peserta Pemilu terdapat 7 partai yang tidak lolos ambang batas parlemen (*parlementary treshold*) yakni Partai Hanura, Partai PKPI, Partai Bulan bintang, Partai perindo, Partai berkarya, Partai Garuda, dan Partai Solidaritas Indonesia. Berikut partai politik yang telah terdaftar dalam aplikasi SIPOL KPU RI per tanggal 2 Juli 2022 untuk sementara sebanyak 41 partai politik;
- (7) Pelaksanaan Pemilu 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, sudah ada partai politik yang mengusung bakal calon presiden yakni dari partai Nasdem yang mengusung bakal calon presiden Anis Baswedan mantan Gubernur DKI, dan untuk partai lain masih melakukan koordinasi atau silaturahmi partai dalam menentukan bakal calon yang akan diusung nantinya. Namun Menurut lembaga survey untuk bakal calon presiden sudah muncul ke publik baik yang digadang oleh masyarakat maupun wacana dari partai politik tersebut, beberapa nama calon yang muncul di publik antara lain Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng), Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan), Ridwan Kamil (Gubernur Jabar), Khofifah

Indraparawansa (Gubernur Jatim), Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata), Airlangga Hartanto (Ketua umum Partai Golkar), Puan Maharani (Ketua DPR RI ) dan Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat);

- (8) Konflik internal partai politik juga sering mewarnai dinamika perpolitikan Indonesia terutama yang dipicu oleh estafet pergantian kepemimpinan maupun akibat perbedaan dukungan calon presiden/wakil presiden. Akibat konflik tersebut beberapa partai politik berujung pecah, elektabilitasnya menurun dan para kadernya membentuk partai politik baru seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat;
- (9) Terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pihak pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dan Presiden Joko Widodo telah melantik Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai kepala dan wakil kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemerintah juga telah mengeluarkan 6 aturan turunan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yakni peraturan pemerintah tentang kewenangan khusus Otorita IKN dan Perpres tentang Otorita IKN. Sementara empat peraturan turunan lainnya ialah peraturan pemerintah tentang pendanaan dan penganggaran IKN, peraturan pemerintah tentang perincian rencana induk IKN, Perpres tentang rencana tata ruang kawasan strategi nasional (KSN) IKN, serta Perpres perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan di IKN. Pembangunan IKN akan dimulai pada tahun 2022 dengan target selesai secara keseluruhan pada tahun 2045 dengan total anggaran sekitar Rp. 466,9 triliun dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau swasta. Pembangunan tahap awal

akan dimulai pada tahun 2022 dan sudah berjalan hingga 2023 dengan membangun perumahan untuk ASN, TNI, Polri termasuk sarana peribadatan, pasar serta fasilitas akomodasi makan dan minum. Kemudian pada awal tahun 2023 hingga tahun 2025 dan selanjutnya akan dilakukan pembangunan fasilitas penelitian dan pengembangan, rumah sakit internasional hingga lembaga pendidikan. Namun demikian masih ada dari pihak oposisi pemerintah masih tetap tidak sependapat dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dengan berbagai alasan terutama kondisi ekonomi negara yang dalam keadaan sulit akibat pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi global sehingga kelompok tersebut sering mengkritisi pemerintah terkait pembangunan Ibu Kota Negara;

- (10) Undang-undang otonomi khusus Papua Nomor 2 Tahun 2021 yang sudah disahkan merupakan wujud komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dengan berpijak pada semangat untuk melindungi dan menjunjung harkat serta martabat orang asli Papua serta berpijak pada percepatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Dana Otsus Papua saat ini akan dimaksimalkan untuk kesejahteraan di Papua tidak lagi akan dibiarkan untuk dikelola tanpa pertanggungjawaban yang jelas akan tetapi akan didampingi oleh pusat. Dana Otsus dinaikan dari 2% menjadi dua seperempat persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) nasional. Seperti diketahui selama ini terdapat kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan Papua memisahkan diri dari Indonesia melalui gerakan Papua Merdeka, rangkaian kekerasan bertahun-tahun terjadi di Papua bahkan cenderung meningkat baik dengan korban warga sipil maupun aparat keamanan. Pemerintah juga

sedang melakukan pembahasan untuk memekarkan Papua menjadi 7 Daerah Otonomi Baru (7 Provinsi), dimana pada tahun 2022 akan ditergetkan terbentuk 3 Provinsi, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dan tahun 2023 manargetkan pembentukan provinsi Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Kepulauan Papua Utara, sampai dengan Tahun 2023 tinggal 2 Provinsi lagi. Dan ditahun 2023 ini jumlah Porvinsi di Indonesia berjumlah 38.

f) Aspek Ekonomi

- (1) Selama 2 tahun ekonomi Indonesiaterganggu bahkan terpuruk akibat pandemi Covid-19, namun kemampuan pemerintah dan masyarakat mengendalikan kasus Covid-19 sehingga kasus Covid-19 terus menurun dan dapat dikendalikan yang mengakibatkan meningkatnya kembali pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat meningkat signifikan 5,01% (*year on year/yoy*) pada kuartal I tahun 2022, hal ini sejalan dengan kuatnya konsumsi dan investasi di tanah air. Adapun kinerja positif juga dibukukan oleh negara-negara mitra dagang Indonesia di Asean dan Asia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif pada kuartal I tahun 2022 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang tersebar di kawasan ASEAN. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan IMF sebelumnya menurunkan proyeksi pertumbuhan global secara signifikan. IMF awalnya menargetkan 4,4% tetapi merevisinya menjadi 3,6%;
- (2) Bahwa konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan dan energi mengalami peningkatan mengakibatkan IMF menurunkan proyeksi global, kemudian IMF juga mengubah proyeksi inflasi

yang sebelumnya 3,9% meningkat menjadi 5,7%. Proyeksi ekonomi untuk negara-negara berkembang sebelumnya 5,9% menjadi 8,7% pada 2022. Perkembangan inflasi negara maju dan berkembang tersebut tentu saja ke depan perlu mendapatkan antisipasi dari Pemerintah Indonesia terkait pengelolaan ekonomi khususnya di tahun 2022. Laju inflasi Indonesia tahun 2023 di kisaran 2%-4% yang ditarget pemerintah dalam asumsi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2023 dinilai masih realistis karena Indonesia masih mampu mengendalikan tingkat inflasi dengan angka yang relatif rendah dibandingkan dengan negara lainnya;

- (3) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato menyampaikan bahwa strategi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan menjaga fleksibilitas APBN dan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi (PEN) di tahun 2022 untuk mengantisipasi perluasan dampak pandemi sehingga *insentif fiskal* menjadi sangat penting menuju percepatan pemulihan perekonomian Indonesia. Pemerintah akan menjaga konsistensi kebijakan fiskal di masa pandemi yang mana krisis ini akan menjadi momentum untuk melanjutkan reformasi struktural dengan 5 strategi prioritas, reformasi fiskal, dan reformasi sektor keuangan;
- (4) Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2022 akibat kasus Covid-19 yang semakin terkendali menjadi harapan pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian di daerah sehingga bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ataupun usaha rumahan diharapkan bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak dari sebelumnya. UMKM merupakan tulang punggung

ekonomi Indonesia dimasa pandemi Covid-19 dalam Pemulihan Ekonomi Nasional. Disamping itu ekonomi digital berkembang pesat di masa pandemi Covid-19 dan menjadi peluang bagi pemulihan ekonomi bahkan kaum millenial pun bisa ikut berkontribusi membangun negara dalam menghadapi pandemi di era baru digital ini bahkan generasi millenial ini bisa menggunakan ruang digital ini untuk melakukan transaksi ekonomi;

- (5) Rasio utang terhadap PDB harus dijaga agar tidak melebihi batas yakni 60%. Menteri keuangan RI mengatakan bahwa kenaikan utang Indonesia karena penanganan wabah pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun terakhir sehingga APBN memerlukan sumber dana yang lebih untuk menangani pandemi Covid-19 dan memulihkan ekonomi serta memberikan bantuan sosial kepada masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kenaikan utang negara juga dialami oleh negara-negara maju lainnya karena wabah pandemi yang terjadi di seluruh penjuru dunia;
- (6) Indonesia merupakan salah satu penghasil CPO dan minyak goreng sawit terbesar di dunia namun memasuki tahun 2022 Indonesia dihadapkan dengan permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Hal tersebut disebabkan tingginya harga minyak goreng di luar negeri akibat terganggunya produksi penghasil minyak terbesar di dunia, akibat invasi Rusia ke Ukraina sehingga banyak CPO dan minyak goreng yang diekspor dan menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga dalam negeri. Pada tanggal 28 April 2022 pemerintah melarang ekspor CPO dan produk turunannya ke luar negeri namun mendapat protes dari petani sawit dan asosiasi petani kelapa sawit dalam negeri turun. Pada tanggal 23 Mei

2022 pemerintah kembali membuka keran ekspor CPO dan minyak goreng dalam negeri sudah mencukupi dan harga mulai turun serta mempertimbangkan keberlangsungan belasan juta pekerja industri sawit;

- (7) Kenaikan harga minyak dunia pertanggal 30 Juni 2022 berada diangka 109,78 USD per barel, hal ini disebabkan invasi Rusia ke Ukraina, kenaikan harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akibat kenaikan harga minyak dunia pihak PT. Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax (RON 92) muli 1 April 2022. Harga BBM dengan RON 92 itu naik dari sekitar Rp. 9.000.,-Rp. 9.400.,. per liter jadi Rp. 12.500.,-Rp. 13.000., per liter di 34 Provinsi di Indonesia. Pemerintah juga mengajukan perubahan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 mencapai Rp. 3.106 triliun dikarenakan ada tambahan untuk belanja subsidi energi. Pemerintah memperkirakan penambahan subsidi BBM, LPG, dan listrik berkisar antara Rp. 74,9 triliun. Selain itu ada kebutuhan untuk menambah biaya kompensasi BBM sebesar Rp. 234 triliun serta penambahan kompensasi listrik sekitar Rp. 41 triliun. Pada tanggal 1 Juli 2022 Pemerintah menerapkan penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mensiasati penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran, namun penerapan aplikasi tersebut masih uji coba di 5 Provinsi di Indonesia dan masih belum diterima sepenuhnya oleh masyarakat.

g) Aspek Sosial Budaya

- (1) Indonesia masih dihadapkan dengan permasalahan sosial yang sangat rentan memicu konflik, dimana masalah sosial merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai dalam

dalam kehidupan masyarakat. Beberapa permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia antara lain kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, kriminalitas, tingginya penyakit menular, pendidikan yang rendah dan kenakalan remaja, radikalisme serta intoleransi;

- (2) Permasalahan wabah Covid-19 yang belum tuntas, saat ini Indonesia dihadapkan dengan wabah penyakit lainnya yaitu virus Penyakit Mulut Dan Kuku (PMK) pada hewan ternak dan kasus hepatitis akut dan gagal ginjal pada anak. Indonesia sudah tercatat sebagai negara dengan angka kematian akibat hepatitis akut tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Menurut data *Global Burden of Disease*(GDB) pada tahun 2019 angka kematian akibat hepatitis akut di Indonesia mencapai 2,14 per 100.000 penduduk. Sedangkan penyakit mulut dan kuku (PMK) telah menyebar ke 16 provinsi di Indonesia dan jutaan hewan ternak terjangkit virus tersebut per 22 Mei 2022. Kementrian Pertanian (Kementan) mencatat telah ada 82 Kabupaten dengan 5,45 juta ekor hewan yang terkena PMK atau mencapai 39,4% dari total hewan ternak nasional pada akhir 2021. Pemerintah mengklaim mampu menangani virus PMK salah satunya dengan pemberian vaksin, namun masyarakat peternak sangat khawatir dengan banyaknya hewan ternak mereka khususnya sapi yang terkena virus PMK serta anjloknya harga daging sapi sehingga muncul desakan dari masyarakat agar pemerintah menetapkan kasus PMK sebagai kejadian luar biasa tingkat nasional;
- (3) Terakait kemiskinan pihak pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air pada tahun 2024 mencapai 0%. Pada tahun 2022 pemerintah menetapkan sasaran prioritas sebanyak 212 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem

diperkirakan berada di angka 3-3,5%. Pemerintah juga akan menjalankan sejumlah program untuk menurunkan angka kemiskinan di tanah air seperti *Top up* Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dan program kartu sembako. Badan Pusat Statistik melaporkan ada 7 provinsi dengan jumlah penduduk miskin diatas 1 juta jiwa pada tahun 2021 antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung;

- (4) Organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia banyak memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara, namun disisi lain ada beberapa ormas yang memiliki kepentingan politik yang sangat tinggi dan keras sehingga sering frontal bahkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia bahkan beberapa diantaranya disusupi oleh pemahaman dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila sehingga seringkali memicu kegaduhan dan konflik di masyarakat. Untuk mencegah perpecahan dan intoleransi serta radikalisme di masyarakat, pemerintahan Jokowi telah membekukan/membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang ingin mendirikan negara khilafah di Indonesia. Meskipun kedua Ormas tersebut telah dibubarkan secara organisasi namun pemahaman keras dan radikal mereka masih sangat kuat dan terus menyebar dan berevolusi serta dengan masuk ke sendi-sendi pemerintahan seperti pegawai pemerintahan, aparat keamanan, partai politik dan Ormas lainnya;
- (5) Isu terkait buruh selalu muncul setiap tahunnya di sejumlah daerah Indonesia dan bahkan aksinya cenderung dilakukan dalam bentuk aksi massa untuk memberikan tekanan kepada pemerintah bahkan isu buruh seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan politik

dan mengkritisi kebijakan pemerintah dengan keras seperti yang dilakukan Ormas buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Aksi buruh tidak hanya dilakukan dalam peringatan *May Day* namun setiap momen penting nasional termasuk menjelang penetapan upah minimum, yang dalam beberapa kali Unras isu buruh juga disuarakan oleh Ormas lain maupun kelompok LSM dan mahasiswa yang bukan kaum buruh untuk mengangkat isu-isu buruh. Dalam 2 tahun terakhir isu utama yang terus diperjuangkan oleh Ormas buruh yakni menolak Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) sampai pada tahun 2022 masih terus bergulir dan sudah disahkan dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 30 Desember 2022, walaupun masih ada penolakan dari berbagai kalangan khususnya kaum buruh. Namun tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang merata bagi rakyat Indonesia, dengan begitu tujuan dari peraturan ini adalah meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif bagi investor;

- (6) Perubahan iklim serta pemanasan global berimplikasi terhadap anomali cuaca dan berpengaruh terhadap terjadinya bencana alam di Indonesia. Selain menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, bencana alam juga mengakibatkan permasalahan sosial bagi korban bencana alam. Sebanyak 1.509 kejadian bencana alam terjadi di Indonesia terhitung sejak 1 Januari hingga 14 Mei 2022 yang didominasi oleh banjir dan cuaca ekstrem. Banjir tercatat sebanyak 592 kejadian sedangkan cuaca ekstrem tercatat sebanyak 550 kejadian. Beberapa bencana lain yang dilaporkan BNPB di antaranya tanah longsor dengan 279 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebanyak 70

kejadian, gelombang pasang dan abrasi sebanyak 8 kejadian, serta bencana kekeringan sebanyak 1 kejadian. Serangkaian bencana tersebut telah menyebabkan banyak korban di antaranya 87 orang meninggal dunia, 625 orang luka-luka, 11 orang hilang dan 1.916.950 orang menderita dan harus mengungsi.

h) Aspek Keamanan

- (1) Konflik sosial di Indonesia sangat rentan terjadi akibat heterogenitas penduduk yang berbeda suku, adat, ras dan agama serta adanya perbedaan pandangan politik. Hampir di semua wilayah Indonesia memiliki potensi konflik sosial yang bisa memicu terjadinya benturan fisik antar masyarakat maupun dengan perusahaan dan pemerintah. Konflik sosial belakangan ini semakin mudah terjadi akibat masifnya provokasi oleh masyarakat dalam bentuk aksi massa dan perlawanan terhadap kelompok tertentu;
- (2) Potensi kerawanan konflik sosial di beberapa wilayah Indonesia baik horizontal, SDA/Lahan, SARA dan konflik vertikal;
- (3) Penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan, dan menunjukkan hasil cukup membanggakan. Namun demikian masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas, antara lain : kejahatan siber, terorisme, perampokan, pembalakan liar, pencurian ikan, penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara;
- (4) Kejahatan siber atau kejahatan melalui jaringan internet masih menjadi ancaman bagi stabilitas nasional, pemerintah terus berupaya untuk mengimbangi teknik kejahatan tersebut yang dilakukan pelaku/sindiklat dengan

teknologi jaringan internet dan ntranet, munculnya beberapa kasus di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, *hacking* beberapa situs dan menyadap transmisi data orang lain. Sehingga kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil (perbuatan seseorang memasuki komputer orang lain tanpa izin), dan delik materil (perbuatan menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain);

- (5) Permasalahan agraria terkait kepemilikan tanah/lahan masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Permasalahan lahan HGU/PTPN berpotensi terjadinya konflik antara masyarakat dengan pemerintah maupun instansi terkait;
- (6) Pemberantasan Narkoba menjadi hal yang cukup sulit dihadapi oleh Indonesia derasnya penyelundupan Narkoba dari berbagai negara yang menjadi sindikat internasional dengan luas wilayah Indonesia yang tidak semuanya dapat tercover pengamanan mengakibatkan masih banyak penyelundupan Narkoba yang lolos masuk ke Indonesia. Pemerintah bersama Polri, BNN dan semua komponen masyarakat terus berupaya melakukan edukasi dan pemberantasan Narkoba karena Narkoba sudah menyentuh berbagai kalangan masyarakat hingga usia anak-anak di pedesaan. Pada tahun 2021 BNN RI berhasil mengamankan 3,3 ton Narkoba jenis sabu dengan 223 tersangka. Berdasarkan data Ditjenpas Kemenkumham RI tanggal 27 April 2022 melaporkan bahwa jumlah warga binaan permasyarakatan (WBP) di Indonesia sebanyak 273.822 dimana 135.758 merupakan kasus Narkoba yang terdiri dari 120.042 pengguna dan 15.176 bandar, pengedar, penadah atau produsen Narkoba;

- (7) Secara umum, situasi keamanan di beberapa wilayah Papua merupakan daerah yang rawan dari aksi gangguan keamanan terutama dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan simpatisan Papua Merdeka, Papua Barat, Aceh dan Maluku yang memiliki potensi konflik vertikal dan horizontal yang dipicu oleh masalah intoleransi, ideologi, separatisme, isu diskriminasi etnis serta kesejahteraan masih diwarnai adanya politik dalam rangka membangkitkan semangat memisahkan diri dari NKRI, namun hal tersebut merupakan manuver politik dan menunjukkan eksistensi adanya gerakan separatis.

#### 4) Provinsi Jambi

Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang Ibu kotanya berada di Kota Jambi, dibentuk berdasarkan UU No. 61 Tahun 1958 Tanggal 25 Juli 1958, merupakan provinsi yang memiliki luas 53.435 km<sup>2</sup>. Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° Lintang Utara, 2,45° Lintang Selatan dan antara 101,10°-104,55° Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, sebelah Timur dengan Selat Berhala, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu. Kondisi geografis yang cukup strategis di antara kota-kota lain di provinsi sekitarnya membuat peran provinsi ini cukup penting terlebih lagi dengan dukungan sumber daya alam yang melimpah. Kebutuhan industri dan masyarakat di kota-kota sekelilingnya didukung suplai bahan baku dan bahan kebutuhan dari Provinsi ini.

Luas Provinsi Jambi 53.435 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk Provinsi Jambi berjumlah 3.640.000 jiwa atau dengan tingkat kepadatan 66,10 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebanyak 57,7% dari jumlah tenaga kerja Provinsi Jambi bekerja pada sector pertanian, perkebunan dan perikanan; 15,9% pada sector perdagangan dan 26,4% pada sector jasa. Dengan kondisi ketenagakerjaan yang sebagian besar

masyarakat di Provinsi ini sangat tergantung pada hasil pertanian, perkebunan sehingga menjadikan upaya pemerintah daerah maupun pusat untuk mensejahterakan masyarakat adalah melalui pengembangan sector pertanian.

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi, yakni suku melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi sebesar 37,87%. Selain itu juga ada suku Kerinci di Daerah Kerinci dan sekitarnya yang berbahasa dan berbudaya mirip Minangkabau. Secara sejarah dan budaya merupakan bagian dari varian Rumpun Minangkabau. Juga ada suku-suku asli pedalaman yang masih primitive yakni Suku Kubu dan Suku Anak Dalam. Adat dan budaya mereka dekat dengan budaya Minangkabau. Selainitu juga ada pendatang yang berasal dari Minangkabau, Batak, Jawa, Sunda, Cina, India dan lain-lain.

Sebagian besar masyarakat Jambi memeluk agama Islam, yaitusebesar 96,5%, sedangkan lainnya merupakan pemeluk agama Kristen, Buddha, Hindu dan Konghuchu.

Tingkat kesejahteraan penduduk yang tercermin melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 72,14 (data BPS Provinsi Jambi, IPM Provinsi Jambi tahun 2017-2022). Sedangkan angka pengangguran Provinsi Jambi sebesar 86.460 atau setara dengan 4,59 % penduduk Provinsi Jambi usia angkatan kerja. Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapore (IMS-GT). Jarak tempuh Jambi ke Singapura jalur laut melalui Batam dengan menggunakan kapal cepat (jetfoil) ± 5 jam.

Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 26,1 °C sampai dengan 31 °C dan luas wilayah 53,435 km<sup>2</sup> diantaranya sekitar 60% lahan merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan yang menjadikan kawasan ini merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera. Kelapa sawit dan karet menjadi tanaman perkebunan primadona dengan luas lahan perkebunan kelapa sawit mencapai 259.786 hektar

serta karet mencapai 623.825 hektar. Sementara itu, nilai produksi kelapa sawit sebesar 3.110 kg/ha pertahun. Hasil perkebunan lainnya adalah karet, dengan jumlah produksi 225,702 ton per tahun, kelapa dalam (*virgin coconut*) 119,600 ha menghasilkan 1.385kg/ha pertahun, casiavera 49,529 ha menghasilkan 2.626 kg/ha pertahun, sertateh 2.625 ha menghasilkan 2.328 kg/ha pertahun. Sementara produksi sector pertanian yang dihasilkan oleh kawasanbagian barat Provinsi Jambi yaitu beras kerinci, kentang, kol/kubis, tomat dan kacangkedelai.

Potensi kekayaan alam di Provinsi Jambi adalah minyak bumi, gas bumi, batu bara dan timah putih. Jumlah potensi minyak bumi Provinsi Jambi mencapai 1.270,96 juta m<sup>3</sup> dan gas 3.572,44 milyar m<sup>3</sup>. Daerah cadangan minyak bumi utama di struktur Kenali Asam, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari dengan jumlah cadangan minyak 408,99 juta barrel. Sedangkan cadangan gas bumi utama di struktur Muara Bulian, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Muaro Jambi dengan jumlah cadangan 2.185,73 milyar m<sup>3</sup>.

Wilayah Administratif Pemerintahan, pada Tahun 2023 Provinsi Jambi terdiri dari 11 Kabupaten dan Kota, yang terbagi dalam 9 Kabupaten dan 2 Kota yaitu : Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh Polresnya masih bergabung dengan Polres Kerinci, sedangkan untuk Polsek di jajaran Polda Jambi terdiri dari 94 Polsek dan 3 Polsubsektor. Adapun tipe Polsek Urban sebanyak 5 Polsek, Polsek Rural sebanyak 81 Polsek dan Polsek Prarural sebanyak 8 Polsek).

Isu global maupun nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di Provinsi Jambi. Isu lokal ini akan meliputi berbagai aspek

kehidupan masyarakat Jambi, sehingga perlu dilakukan pemahaman secara tepat dan akurat semua isu yang berkembang agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Jambi.

Perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat, selain disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada di daerah, juga karena adanya pengaruh yang terjadi pada lingkungan global, nasional dan Provinsi Jambi. Agar Polri dalam jajaran Polda Jambi dapat secara tepat menyelesaikan permasalahan yang muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan yang timbul dan bersumber dari berbagai aspek kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut :

a) Ideologi

- (1) Di wilayah Provinsi Jambi bagi organisasi politik dan organisasi masyarakat lainnya sudah masih sepenuhnya mendasari cara berpikir/ pandangan dan menghayati Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bangsa. Namun ada beberapa kelompok kecil yang terindikasi memberikan doktrin terhadap ideologi lain yaitu ideology berdasarkan agama tertentu atau khilafah;
- (2) Gerakan reformasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan berpolitik masyarakat daerah Jambi hal ini terlihat dari meningkatnya kegiatan penyampaian aspirasi, unjuk rasa (demonstrasi) khususnya yang dilaksanakan oleh kalangan mahasiswa, karyawan/buruh, warga transmigrasi, petani dan nelayan.

b) Politik

- (1) Akhir masa jabatan Kepala Daerah di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
  - (a) Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir pada Bulan Desember 2024;

- (b) Bupati Merangin berakhir pada tanggal 22 September 2023;
  - (c) Walikota Jambi berakhir pada tanggal 7 November 2023;
  - (d) Bupati Kerinci berakhir pada tanggal 4 Maret 2024;
  - (e) Bupati Tanjab Barat berakhir pada bulan Desember 2024;
  - (f) Bupati Batanghari berakhir pada bulan Desember 2024;
  - (g) Bupati Tanjab Timur berakhir pada bulan Desember 2024;
  - (h) Bupati Bungo berakhir pada bulan Desember 2024;
  - (i) Walikota Sungai Penuh berakhir pada bulan Desember 2024.
- (2) Rencana tahapan Pilkada serentak tahun 2024 sebagai berikut:
- (a) Pengumuman penyerahan syarat dukungan Paslon tanggal 23 Februari – 13 Maret 2024;
  - (b) Penyerahan syarat dukungan Paslon perorangan untuk Pilgub tanggal 14 – 18 Mei 2024;
  - (c) Penyerahan syarat dukungan Paslon perorangan untuk Pilbup/Pilwakot tanggal 17 – 21 Mei 2024;
  - (d) Pengumuman, pendaftaran dan verifikasi Paslon tanggal 28 Agustus – 21 September 2024;
  - (e) Penetapan Paslon tanggal 22 September 2024;
  - (f) Kampanye tanggal 25 September – 23 November 2024;
  - (g) Pungut dan hitung suara 27 November 2024;
  - (h) Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan tanggal 28 November – 8 Desember 2024;
  - (i) Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota tanggal 1 – 11 Desember 2024;

(j) Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Provinsi tanggal 4 – 14 Desember 2024.

c) Ekonomi

- (1) Adanya permasalahan tumpang tindih lahan tambang, hutan, lingkungan, tapal batas wilayah, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah yang kurang kondusif dan jaminan kepastian hukum dan keamanan serta gangguan kegiatan pertambangan liar (Tanpa Ijin);
- (2) Munculnya resistensi dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah karena dianggap merugikan masyarakat (kelangkaan gas subsidi, kenaikan TDL, BBM, dsb);
- (3) Pembangunan sektor pertanian masih banyak menghadapi kendala antara lain menyusutnya lahan pertanian masyarakat akibat tergusur oleh perumahan dan industrialisasi serta perusahaan perkebunan yang kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan;
- (4) Kurangnya rasa tanggung jawab pejabat yang berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan sumber daya hutan, kurangnya pengawasan hutan oleh polisi kehutanan serta lemahnya mentalitas aparat penegak hukum dalam menegakkan pelanggaran hukum dibidang kehutanan;
- (5) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan belum menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga kerja, sehingga ada kecenderungan resistensi dari pihak pekerja untuk mendesak direvisinya undang-undang ini;
- (6) Sengketa lahan/hutan antara perusahaan dengan masyarakat masih akan terus terjadi dikarenakan tidak

adanya kepastian dari pemerintah pusat maupun daerah dalam penyelesaian lahan tersebut secara tuntas;

- (7) Maraknya aktifitas pertambangan batu bara dan pertambangan emas tanpa ijin di beberapa daerah dalam Provinsi Jambi seperti Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari masih akan terus terjadi mengingathal ini merupakan peluang mata pencarian bagi sebagian masyarakat namun juga berdampak buruk bagi kerusakan lingkungan, memakan korban jiwa, menimbulkan kemacetan dan berdampak pada kelangsungan ekonomi di beberapa daerah yang dilalui oleh jalur batubara, dan berpotensi menimbulkan konflik sosial dimasyarakat.

d) Sosial Budaya

- (1) Kehidupan umat beragama telah mampu mempermudah, memperluas dan mengembangkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, namun masih bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan keberimanan dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- (a) Jamaah Ahmadiyah di tiga kabupaten/ kota yakni Kota Jambi, Kabupaten Sarolangun dan Kerinci;
- (b) Jamaah Tarikat Naqshabandiah di Kabupaten Batanghari;
- (c) Majelis Tafsir Alqur'an di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci.
- (2) Konflik horizontal dan vertikal di beberapa daerah yang dilatar belakangi masalah pertanahan, perkebunan, pertambangan dan perbatasan wilayah masih akan mewarnai situasi keamanan dalam Provinsi Jambi.

Termasuk kondisi saat ini ada kecenderungan luntarnya nilai-nilai luhur atau “kebhinekaan” dalam pergaulan hidup antarkelompok masyarakat menimbulkan aksi-aksi intoleran antar umat beragama khususnya Ormas-ormas yang dilatarbelakangi agama;

- (3) Masalah keberadaan tenaga kerja asing (TKA) asal China yang diperkerjakan sebagai tenaga ahli di Perusahaan-perusahaan seiring dengan kedatangannya yang tidak terkendali sehingga memicu kesenjangan dengan penduduk lokal. Kondisi ini rawan dimanfaatkan sebagai isu politik, isu sara yang dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik;
- (4) Dampak negatif perkembangan teknologi terutama media sosial dan penyimpangan teknologi dapat terjadi di semua kalangan masyarakat dan terjadi di semua wilayah termasuk ke pelosok-pelosok desa yang terjangkau dengan jaringan internet dan telekomunikasi. Kasus yang rawan terjadi yakni tindak kekerasan, pornoaksi/pornografi, prostitusi, penipuan, penyimpangan sosial, isu-isu yang bersifat provokasi, ujaran kebencian, hoaks dan bahkan dapat memicu terjadinya konflik sosial;
- (5) Masalah peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan di daerah-daerah terpencil, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang mendapat perhatian pemerintah, dihadapkan lagi pada sistem pemerataan perluasan pendidikan yang kurang baik, pola manajemen yang tidak efisien. Kurang efisien dan kurang relevannya pendidikan dengan tuntutan perubahan, proses pembelajaran yang menekankan pada pencapaian target dengan mengabaikan aspek kualitas, pola pengajaran yang masih berorientasi pada guru, rendahnya kualitas guru dan kualifikasi mengajar guru.

e) Keamanan

- (1) Kondisi keamanan dapat dilihat dari gangguan Kamtibmas, gangguan Kamtibcar Lantas, gangguan Kamtibmas non pidana, dan situasi keamanan di masing-masing wilayah Kabupaten dan Kota. Secara umum situasi keamanan sudah semakin kondusif khususnya di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi, namun di beberapa daerah tertentu masih terjadinya kasus-kasus yang meresahkan masyarakat seperti Curas dengan menggunakan Senpi, perkelahian antar desa atau antar kelompok dan geng motor;
- (2) Provinsi Jambi merupakan daerah lintas darat Sumatera (penghubung antar provinsi) digunakan sebagai akses dan tempat untuk melakukan kejahatan khususnya Curas/ Curat dan Narkoba oleh jaringan antar wilayah;
- (3) Provinsi Jambi memiliki pelabuhan laut dan daratan yang terbuka sepanjang Sungai Batang Hari yang sangat dimungkinkan untuk penyelundupan orang dan barang dari dan menuju luar negeri;
- (4) Kasus kejahatan Curanmor yang semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya, hal ini dapat dilihat dari jumlah kerugian yang dialami korban maupun Modus Operandi yang dilakukan oleh para terindikasi dengan adanya proses pembelian melalui *leasing* dengan uang muka yang sangat ringan yang di *back up* asuransi, hal ini juga dipengaruhi oleh karena adanya kemudahan masyarakat dalam memperoleh kredit kepemilikan bermotor dengan *Down Payment* (DP) rendah/kecil karena didukung oleh Lembaga Keuangan Non Bank (*Leasing*) serta adanya jaminan penggantian biaya oleh pihak asuransi apabila kendaraan itu hilang atau dicuri;

- (5) Trend situasi Kamtibmas dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal tersebut disebabkan bertambahnya jumlah penduduk dalam Provinsi Jambi dan dampak dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik global maupun nasional;
- (6) Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polda Jambi dan jajaran pada tahun 2024 diperkirakan akan diwarnai dengan berbagai jenis dan bentuk gangguan Kamtibmas baik dalam dimensi kejahatan/tindak pidana maupun gangguan keamanan non pidana, hal ini seiring dengan dilaksanakan Pemilu 2024.

## 1. Analisis

Pelaksanaan tugas Polri masih dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari faktor internal dan eksternal sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis agar dapat ditemukan langkah yang tepat dalam menyusun kebijakan dan strategi Polda Jambi yang saat ini memiliki personel yang sudah tergelar mulai dari Polda Jambi sampai dengan Polsubsektor yang telah didukung oleh sarana dan prasarana yang semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini tentunya perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dalam melaksanakan tugasnya, sehingga berdampak akan diusulkan kembali untuk kenaikan tunjangan kinerja Polri menjadi 80%.

Adapun kondisieksternal yang dihadapi antara lain: gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat semakin dinamis, perkembangan teknologi informasi dapat menimbulkan peluang kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi (kejahatan Siber). Masih dijumpai adanya kecenderungan masyarakat dalam menangani masalah keamanan bertindak dengan main hakim sendiri, sehingga berdampak buruk terhadap penegakan dan kepastian hukum. *Trend* peningkatan 4 jenis kejahatan, radikalisme, korupsi, Narkoba dan *Illegal Things (Illegal logging, Illegal Mining, Illegal Fishing, Illegal Tapping)* menuntut Polri untuk

lebih optimal di bidang pencegahan dan penegakan hukum. Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih terkait kewenangan antar lembaga penegak hukum menimbulkan kerancuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Semakin meningkatnya kejahatan *transnasional* sehingga lalulintas orang dan barang *illegal* semakin mudah dan cepat untuk dilakukan.

## 2. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan tugas Polri seiring dengan perkembangan lingkungan strategi global, regional dan nasional akan semakin berat dan kompleks. Serta tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesionalis mekinerja Polri dan pelayanan di bidang Kepolisian oleh Polri yang semakin tinggi mengharuskan Polri Menyusun berbagai upaya dan langkah-langkah aksi yang konkret dan efektif dalam mewujudkan Kamdagri khususnya di Provinsi Jambi. Secara umum permasalahan di bidang keamanan yang akan dihadapi Polda Jambi pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pengamanan tahapan Pemilu menuju 2024 dan mendukung program pemerintah dalam membangun Ibu Kota Negara (IKN).
- b. Transformasi digital menjadi pendorong penting dalam *respons* terhadap *pandemic* untuk mengantisipasi risiko penularan dan memastikan penerapan jarak fisik (*physical distancing*), sementara juga memungkinkan kelangsungan layanan dan aktivitas ekonomi tertentu secara virtual. Perubahan kebiasaan seperti bekerja dan belajar jarak jauh juga menjadi norma bagi sebagian besarmasyarakat;
- c. Isu korupsi, pelanggaran HAM, deforestasi dan lingkungan serta kasus lahan di sejumlah tempat akan menjadi perhatian dan perbincangan pada tahun 2024;
- d. Segregasi (pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya) masyarakat berdasarkan SARA akan semakin kuat dengan adanya persiapan kontestasi Pemilu 2024;

- e. Konflik SARA terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki setiap kelompok yang dipengaruhi oleh rendahnya toleransi di masyarakat. Adanya kelompok identitas mengatasnamakan suku maupun golongan tertentu menjadi pemicu munculnya konflik antar etnis/suku, paham politik saat ini juga berperan dalam menciptakan kebencian antar suku/etnis dan umat beragama sehingga memicu timbulnya tindakan kekerasan yang berujung terjadinya konflik SARA;
- f. Penyebaran paham radikalisme dan intoleransi serta unjuk rasa masih akan terjadi pada tahun 2024, serta masih akan tetap menyuarakan ideologinya dan menentang keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara yang akan mengganggu stabilitas dan keamanan nasional;
- g. Menguatnya kepentingan elit politik dalam memperebutkan sumber daya alam mendorong munculnya tuntutan pemekaran wilayah untuk mendapat kekuasaan;
- h. Proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai ancaman dari segi ideologi, politik, ekonomi dan social budaya, perkembangan teknologi informasi dan lemahnya penegakan hukum menyebabkan maraknya pelanggaran hak cipta melalui dunia maya (*cyber crime*) dan penyebaran informasi hoaks yang melanggar UU IT, yang perlu diantisipasi dengan penguatan Pancasila;
- i. Masalah keamanan dan ketertiban serta kelancaran berlalulintas terutama di kota-kota besar masih menyimpan berbagai permasalahan krusial, dikaitkan dengan intensitas kendaraan yang meningkat yang tidak selaras dengan perkembangan sarana jalan;
- j. Gangguan Kamtibcar Lantas berupa kecelakaan, pelanggaran dan kemacetan arus lalulintas cenderung mengalami peningkatan, sebagai dampak meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan pembangunan sarana dan prasarana jalan, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi rambu-rambu dan tertib lalu lintas;

- k. Kurangnya pengawasan dan tanggung jawab keamanan atau keselamatan penumpang jasa angkutan udara, laut dan darat, mendorong meningkatnya angka kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian materiil;
- l. Percepatan teknologi digital yang sangat cepat Polri dituntut untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- m. Kejahatan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang masih terus ditingkatkan penanganannya secara baik sesuai SPM dan perlu penanganan khusus;
- n. Penyelundupan, pencurian terhadap sumber daya alam dan merusak lingkungan hidup masih sering terjadi dan dapat merusak ketahanan dan keamanan pangan;
- o. Peredaran Narkoba, kejahatan korupsi dan terorisme, keberadaan dan kegiatan kelompok teroris masih tumbuh dan berkembang, mereka mengembangkan pola kegiatan dan sasaran secara *sporadic* termasuk terhadap sasaran aparat keamanan dan pejabat pemerintah, saat ini kejahatan siber serta kejahatan konvensional semakin marak dan telah pada taraf yang meresahkan masyarakat sebagai akibat adanya pandemi *Covid-19*;
- p. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan masih lemahnya penegakan hukum, menimbulkan kecenderungan mengabaikan aturan Undang-Undang, serta masih tingginya konflik sosial, aksi *sweeping*, premanisme dan tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- q. Percepatan teknologi digital yang sangat cepat menuntut Polri untuk mampu menjaga keamanan dari sisi siber;
- r. Masih tingginya titik kemacetan, pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas terutama yang disebabkan oleh angkutan berat batubara dan sawit;
- s. Kegiatan *illegal drilling* di beberapa Kabupaten dalam Provinsi Jambi.

## II. TUJUAN DAN SASARAN

### 1. Visi dan Misi Polda Jambi

#### a. Visi Polda Jambi

**“Terwujudnya wilayah hukum Polda Jambi yang aman dan tertib”.**

Makna : Kepolisian Daerah Jambi mewujudkan Jambi yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepentingan berlandaskan gotong-royong”.

#### b. Misi Polda Jambi

**“Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat di wilayah hukum Polda Jambi guna memelihara Kamtibmas serta menegakkan Hukum yang berkeadilan”.**

Makna : Melindungi, dan Melayanai Masyarakat dalam rangka memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

### 2. Visi dan Misi Bidhumas Polda Jambi. Visi

Bidhumas“Terwujudnya pelayanan Bidhumas POlda Jambi yang professional, unggul dan dipercaya dalam Pengelolaan Informasi tentang Kinerja Polrib Misi Bidhumas1).

Meningkatkan kompetensi SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam rangka mengelola informasi tentang kinerja Polri;

2). Meningkatkan dan menyempurnakan system dan metode yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidhumas Polda Jambi;

3). Memenuhi dan melengkapi sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengemban fungsi Humas Polri baik di pusat maupun kewilayahan secara bertahap dan berkelanjutan;

- 4). Mengusulkan kebutuhan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam melaksanakan pengelolaan informasi tentang kinerja Polri.

## 2. Tujuan Jangka Menengah

### a. Polda Jambi

- 1) Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban masyarakat di seluruh Daerah Jambi;
- 2) Menegakkan hukum secara berkeadilan;
- 3) Modernisasi pelayanan Polri di Polda Jambi;
- 4) Mewujudkan Polri yang Profesional;
- 5) Menerapkan manajemen Polri di Polda Jambi yang terintegrasi dan terpercaya.

b. Bidhumas Polda Jambi1). Tercapainya peningkatan kompetensi SDM yang mampu melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam rangka mengelola informasi tentang kinerja Polri;

- 2). Tercapainya peningkatan dan penyempurnaan system dan metode Bidhumas Polda Jambi yang dapat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidhumas Polda Jambi;
- 3). Terpenuhnya kelengkapan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengemban fungsi Humas Polri baik di pusat maupun kewilayahan secara bertahap dan berkelanjutan;

4). Terpenuhnya kebutuhan anggaran yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Bidhumas Polda Jambi dalam melaksanakan pengelolaan informasi tentang kinerja Polri.

## 3. Sasaran Prioritas

### a. Polda Jambi

- 1) **Pertama** “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”;
- 2) **Kedua** “Penegakan Hukum Secara berkeadilan”;

- 3) **Ketiga** “Profesionalisme SDM”;
- 4) **Keempat** “Modernisasi Teknologi”;
- 5) **Kelima** “Sistem Pengawasan Polda Jambi Yang Akuntabel, Bersih, Terbuka dan Melayani”.

b. Bidhumas Polda Jambi

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan fungsi bidang Humas dilingkungan Polri maka sasaran yang diprioritaskan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Tertatanya struktur organisasi Bidhumas Polda Jambi serta terpenuhinya personel yang lebih efektif dalam rangka antisipasi tugas-tugas dibidang fungsi humas dalam memberikan pelayanan informasi, penyebaran/disemenasi informasi serta Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- 2) terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan dibidang fungsi kehumasan berupa kemampuan jurnalistik, public speaking, media handling, fotografi, videografi dan desain grafis;
- 3) memberikan pelayanan informasi public sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan melalui berbagai media massa baik cetak, elektronik, media sosial dan media online;
- 4) tersusunnya piranti lunak berupa Peraturan Kapolri dan Peraturan Kadiv Humas yang mengatur tentang mekanisme Prosedur Tetap (Protap) dibidang fungsi humas;
- 5) menjadikan Bidhumas POLda Jambi sebagai sumber informasi yang obyektif, dipercaya, partisipatif, responsive, humanis, transparan dan akuntabel;
- 6) terwujudnya kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam meningkatkan citra positif Polri

melalui penyebaran/diseminasi informasi di media massa baik cetak maupun elektronik termasuk media online dan media sosial.

### **III. Program Prioritas dan Kegiatan Tahun 2024**

#### **1. Arah Kebijakan dan Kegiatan Polda Jambi**

Untuk mewujudkan pencapaian Sasaran Prioritas Polda Jambi Tahun 2024 maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan dalam rangka mencapai sasaran Prioritas **“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat”**, yaitu:

1) Peningkatan kemampuan deteksi aksi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

- a) Analisis keamanan (3112, Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - b) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (3114); Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - c) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi (3115); Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - d) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (3116); Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - e) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara (Giat 3117); Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas)
  - f) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan khusus (Giat 3150); Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas).
- 2) Menurunkan potensi kejahatan, gangguan Kamtibmas melalui kegiatan pencegahan yang proaktif guna mencegah terjadinya kejahatan;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

- a) Pembinaan potensi keamanan (Giat 5076) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1(indek Harkamtibmas);
  - b) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Giat 3130) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - c) Penyelenggaraan pengamanan objek vital (Giat 3131) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - d) Penyelenggaraan kepolisian perairan (Giat 3134) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - e) Pengelolaan multimedia (Giat 3149) Prog 2 (Dukungan Manajemen Polri), SP.2 (Dukungan Manajemen); SS4 (Modernisasi teknologi); IKP 3, IKP 4, dan IKP 5 (Survey Kepuasan penggunaan Alkom, presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda, Presentase pemenuhan Alkam).
- 3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan “Pemolisian *Prediktif*” dalam rangka menjaga Stabilitas Harkamtibmas (*Cooling System*);

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

- a) Pembinaan potensi keamanan (Giat 5076), Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - f) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Giat 3130) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - g) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (Giat 3133) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas).
- 4) Mengedepankan penanganan konflik secara humanis, Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:
- a) Analisis keamanan (Giat 3112) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - b) Pembinaan potensi keamanan (Giat 5076) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - c) Penanggulangan keamanan dalam negeri (Giat 5087) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - d) Pelayanan psikologi anggota Polri (Giat 3110) Prog 1 (Profesionalisme SDM); SP.4 (Profesionalisme dan kesejahteraan Polri ); SS3 (Profesionalisme SDM); IKP 1 (indek Profesionalisme SDM Polda Jambi);

- 5) Meningkatkan Gakkum Lantas menggunakan *ETLE* dan tilang manual serta mengoptimalkan Kamseltibcar Lantas guna memberikan rasa aman di tengah masyarakat baik saat terjadi kemacetan dan jam rawan kejahatan;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:
- a) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Giat 3130) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indekHarkamtibmas);
  - b) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (Giat 3133) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1(indek Harkamtibmas);
- 6) Meningkatkan peran aktif dan kehadiran Polri di lokasi rawan gempa dan bencana;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:
- c) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Giat 3130) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - d) Pembinaan potensi keamanan (Giat 6076) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - e) Penanggulangan keamanan dalam negeri (Giat 5087) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1(Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas).

- 7) Melaksanakan kegiatan pengamanan *even* nasional/internasional tahun 2024;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:
- a) Pembinaan operasi kepolisian (Giat 5079) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - b) Penanggulangan keamanan dalam negeri (Giat 5087) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - c) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (Giat 3133) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - d) Penyelenggaraan pengamanan objek vital (Giat 3131) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - e) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya (Giat 3116) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas).
- 8) Meningkatkan penggelaran operasional kepolisian dan *back up* kewilayahan dalam rangka penanganan konflik sosial, pengamanan unjuk rasa, dan menjalin sinergitas polisional serta gangguan keamanan bersenjata;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

- a) Pembinaan pelayanan fungsi fungsi Sabhara (Giat 3130) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - b) Penanggulangan keamanan dalam negeri (Giat 5087) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1(indek Harkamtibmas);
  - c) Pembinaan potensi keamanan (Giat 5076) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - d) Pembinaan operasi kepolisian (Giat 5079) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1(indek Harkamtibmas).
- 9) Meningkatkan kerja sama kepolisian dalam/luar negeri guna mendukung Stabilitas Harkamtibmas;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan : Kerjasama keamanan dan ketertiban K/L (Giat 3120) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
- 10) Meningkatkan penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan : Penyelenggaraan kepolisian udara (Giat 3135) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1(indek Harkamtibmas).
- 11) Melaksanakan pengamanan tahapan Pemilu 2024;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

- a) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Giat 3130) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
- b) Penyelenggaraan pengamanan objek vital (Giat 3131) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1(indek Harkamtibmas);
- c) Penanggulangan keamanan dalam negeri (Giat 5087) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1(Harkamtibmas); IKU1 (indekHarkamtibmas);
- d) Pengendalian operasi kepolisian (Giat 5087) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indekHarkamtibmas);
- e) Penyenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik (Giat 3114) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1(Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas).

- 12) Meningkatkan kehadiran Polri di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

- a) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Giat 3130) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1(indek Harkamtibmas);

- b) Penyelenggaraan kepolisian perairan (Giat 3134) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas).
- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Polri Yang Inovatif”**, yaitu:
- 1) Modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
    - a) Pengembangan peralatan Polri (Giat 3084) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
    - b) Teknologi komunikasi (Giat 5055) Prog 3 (Modernisasi Almatsus), SP. 4 (modernisasi teknologi) SS4 (Modernisasi Teknologi), IKP 4 (presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda.
  - 2) Meningkatkan profesionalisme anggota Polri dalam melayani masyarakat (alur pelayanan, biaya pelayanan, dan waktu pelayanan) guna meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
    - a) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Giat 3100) Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.2 (Kepuasan Penyelenggaraan Diklat);

- b) Pembinaan potensi keamanan (Giat 5076) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - c) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas (Giat 3133) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - d) Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Giat 3128) Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas).
- 3) Meningkatkan pembangunan ruang SPKT dan RPK yang *online dan humanis* serta berbasis TIK;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
- a) Penindakan tindak pidana umum (Giat 3142) Prog 2 (Lidik dan Sidik), SP. 2 (Penegakan hukum secara berkeadilan), SS2 (penegakan hukum secara berkeadilan), IKU 2 (indeks Gakum Polda Jambi);
  - b) Pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri (Giat 5062) Prog 3 (Modernisasi Almatsus dan Sarpras), SP.4 (Modernisasi Teknologi), SS4 (modernisasi teknologi), IKP 4 (Presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda).
- 4) Meningkatkan *quick response* kepolisian sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP);

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

- f) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara (Giat 3130), Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (Indeks Harkamtibmas);
  - a) Pelayanan kesehatan Polri (Giat 3072) Prog 1 (Prof SDM Polri), Sp.3 (Profesionalisme SDM), SS3 (Prof SDM), IKP 1 (Indeks profesionalisme SDM Polda).
- c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penegakan Hukum Yang Transparan dan Akuntabel”**, yaitu:
- 1) Meningkatkan profesionalisme penyidik dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan masyarakat;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
    - a) Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana (Giat 3140) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (penegakan hukum secara berkeadilan), SS2 (penegakan hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakkum Polda Jambi);
    - b) Penyelenggaraan laboratorium forensik (Giat 3141) Prog 3 (modernisasi Almatsus dan Sarpras), Sp.4 (Modernisasi teknologi), SS4 (modernisasi teknologi), IKP 4 (presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda);

- c) Penindakan tindak pidana umum (Giat 3142) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi);
- d) Penindakan tindak pidana Narkoba (Giat 3144) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi);
- e) Penindakan tindak pidana khusus (Giat 3145) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi);
- f) Penindakan tindak pidana korupsi (Giat 3146) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi);
- g) Penindakan tindak pidana siber (Giat 3151) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi);
- h) Penindakan tindak pidana tertentu (Giat 5083) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi);
- i) Penindakan tindak pidana perairan (Giat 3134) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara

Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi);

j) Penindakan tindak pidana lalu lintas (Giat 4343) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi).

2) Melaksanakan sertifikasi penyidik guna meningkatkan kemampuan penyidik di *era 4.0*

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: Penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri (Giat 3100) Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.2 (Kepuasan Penyelenggaraan Diklat);

3) Meningkatkan proses penyidikan yang efektif guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan: pengawasan penyidikan (Giat 5086) Prog 2 (Lidik dan Sidik), Sp.2 (Penegakan Hukum secara Berkeadilan), SS2 (Penegakan Hukum secara berkeadilan), IKU 2 (Indeks Gakum Polda Jambi).

d. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri”**, yaitu:

1) Mengoptimalkan penggunaan Bisnis Proses Polri dalam pengembangan struktur organisasi Polri;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Giat 5052) Prog 5 (Dukungan manajemen), SP.5 (Sistem

Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan Polda Jambi yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani), IKP 8 (indeks Reformasi Birokrasi);

- 2) Meningkatkan SDM Polri yang unggul di *era Polce 4.0*;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Pengendalian pegawai Polri (Giat 3107), Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.1 (indeks Profesionalisme SDM Polda Jambi);
- 3) Meningkatkan pengelolaan SDM yang humanis;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:
  - a) Manajemen anggaran (Giat 5054), Prog 5 (Dukungan manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan Polda Jambi yang akuntabel, bersih, terbuka dan melayani), IKP 7 (Laporan Keuangan);
  - b) Pembinaan karier personel Polri (Giat 3108), Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.1 (indeks Profesionalisme SDM Polda Jambi);
  - c) Penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri (Giat 3195), Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.1 (indeks Profesionalisme SDM Polda Jambi);
- 4) Melaksanakan sistem manajemen karier berbasis kinerja;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Pembinaan karier personel Polri (Giat 3106)

Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.1 (indeks Profesionalisme SDM Polda Jambi);

5) Meningkatkan ketrampilan dan etika Yanlik serta kemampuan komunikasi digital untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri (Giat 3100), Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.2 (kepuasan penyelenggaraan Diklat);

6) Meningkatkan kesejahteraan melalui layanan kesehatan, perumahan dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri ;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

a) Pelayanan kesehatan (Giat 3072), Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.1 (indeks Profesionalisme SDM Polda Jambi);

b) Pengembangan fasilitas dan kontruksi Polri (Giat 5062) Prog 3 (Modernisasi Almatsus dan Sarpras), SP.4 (Modernisasi Teknologi), SS4 (Modernisasi teknologi, IKP 4 (presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda);

c) Penyelenggaran administrasi perawatan pegawai Polri (Giat 3105) Prog 1 (Profesionalisme SDM), SP.3 (Profesionalisme SDM Polri), SS3 (Profesionalisme SDM), IKP.1 (indeks Profesionalisme SDM Polda Jambi).

e. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang Modern”**, yaitu:

- 1) Memenuhi rumah dinas pegawai Polri serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Giat 5062), Prog 3 Modernisasi Almatsus dan Sarpras), SP.4 (Modernisasi Teknologi), SS4 (Modernisasi teknologi, IKP 4 (presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda);
- 2) Pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri (Giat 5062) Modernisasi Almatsus dan Sarpras), SP.4 (Modernisasi Teknologi), SS4 (Modernisasi teknologi, IKP 4 (presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda);
- 3) Meningkatkan pengembangan Almatsus SCI;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Pengembangan peralatan Polri (Giat 3084) Modernisasi Almatsus dan Sarpras), SP.4 (Modernisasi Teknologi), SS4 (Modernisasi teknologi, IKP 4 (presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda);
- 4) Membangun dan menyatukan sistem informasi kepolisian yang terintegrasi;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Pengembangan peralatan Polri (Giat 3054), Prog 3 (Modernisasi Almatsus dan Sarpras), SP.4

(Modernisasi Teknologi), SS4 (Modernisasi teknologi, IKP 4 (presentase pemenuhan ketersediaan ADK pada Almatsus Polda);

f. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas **“Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih melalui Optimalisasi Pengawasan yang Efektif Berbasis T.I”**, yaitu:

1) Memperkuat penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya berbasis *online*;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

a) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Giat 3091), Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 6 (Nilai AKIP);

b) Pengawasan penyidikan (Giat 5086) Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 11 (Presentase penanganan pengaduan Masyarakat).

2) Mengoptimalkan Saber Pungli (sapu bersih pungutan liar) di lingkungan internal Polri;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan (Giat 3091), Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 6 (Nilai AKIP);

3) Meningkatkan kegiatan pencegahan korupsi di internal Polri;

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:

- a) Penyelenggaraan pengamanan internal Polri (Giat 3089), Prog 4 (Harkamtibmas), SP.1 (Harkamtibmas); SS1 (Harkamtibmas); IKU1 (indek Harkamtibmas);
  - b) Pelayanan administrasi keuangan Polri (Giat 3068), Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 7 (Laporan Keuangan Akuntabel).
- 4) Meningkatkan tata kelola manajemen kinerja perencanaan dan Polri yang akuntabel;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan:
- a) Penyusunan kebijakan Polri (Giat 5051), Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 8 (Nilai Reformasi Birokrasi);
  - b) Manajemen anggaran (Giat 5054), Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 7 (Laporan Keuangan Akuntabel);
  - c) Pelayanan administrasi keuangan Polri (Giat 3068), Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 7 (Laporan Keuangan Akuntabel).
- 5) Menata kelembagaan dan tata laksana Polres, Polsek dan Polsubsektor serta penguatan struktur organisasi Polri agar efektif dan efisien sesuai dengan Bisnis Proses Polri;  
Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri (Giat 5052), Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5

(Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 9 (Indeks kepuasan layanan kepolisian IKLK).

- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik Polri melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri; Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan: Reformasi Birokrasi Polri (Giat 5053), Prog 5 (Dukungan Manajemen), SP.5 (Sistem Pengawasan), SS5 (Sistem Pengawasan), IKP 8 (Nilai Reformasi Birokrasi).

## **2. Arah kebijakan dan strategi Bidhumas Polda Jambi tahun 2024**

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Bidhumas Polda Jambi tahun 2024, maka ditetapkan Arah Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

2,3149,5056SSI/SSI/

#### **IV. Program, Kegiatan dan Pagu Ideal Polda Jambi Prioritas T.A. 2024**

##### **1. Program dan kegiatan.**

###### **a. Program Profesionalisme SDM Polri**

###### **1) Tujuan;**

Terwujudnya postur SDM Polri yang profesional, modern dan terpercaya berdasarkan kompetensi dan kinerja yang optimal melalui infrastruktur SDM yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan guna mendukung produktifitas kerja, disiplin dan tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya guna meningkatkan *value* organisasi.

###### **2) Kegiatan:**

- a) Dukungan manajemen dan teknis Profesionalisme SDM Polri;
- b) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri;
- c) Penyelenggaraan administrasi perawatan pegawai Polri;
- d) Pembinaan karier personel Polri;
- e) Pelayanan psikologi anggota Polri;

###### **b. Program Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana**

###### **1) Tujuan**

Terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban melalui penegakan hukum yang profesional, proposional, dan akuntabel serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

###### **2) Kegiatan**

- a) Dukungan manajemen dan teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;

- b) Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
  - c) Penyelenggaraan laboratorium forensik
  - d) Penindakan tindak pidana umum;
  - e) Penindakan tindak pidana Narkoba;
  - f) Penindakan tindak pidana ekonomi khusus;
  - g) Penindakan tindak pidana korupsi;
  - h) Penindakan tindak pidana siber;
  - i) Penindakan tindak pidana perairan;
  - j) Penindakan tindak pidana lalu lintas;
  - k) Penindakan tindak pidana tertentu;
  - l) Koordinasi dan pengawasan PPNS;
  - m) Pengawasan penyidikan.
- c. Program Modernisasi Almtasus dan Sarana Prasarana Polri.
- 1) Tujuan  
Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan modernisasi Almtsus dan sarana prasarana Polri guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan dan operasional.
  - 2) Kegiatan
    - a) Pengembangan peralatan Polri;
    - b) Dukungan manajemen dan teknik Sarpras;
    - c) Pengembangan Fasilitas dan kontruksi Polri;
- d. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
- 1) Tujuan  
Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan manajemen operasional dan informasi Kepolisian serta

kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.

2) Kegiatan

- a) Analisis keamanan;
- b) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik;
- c) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi;
- d) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya;
- e) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara;
- f) Kerja sama keamanan dan ketertiban K/L;
- g) Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- h) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;
- i) Penyelenggaraan pengamanan objek vital;
- j) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang Lantas;
- k) Penyelenggaraan kepolisian perairan;
- l) Penyelenggaraan strategi keamanan dan keselamatan masyarakat di bidang khusus;
- m) Pembinaan potensi keamanan;
- n) Pembinaan operasi kepolisian;
- o) Pengendalian operasi kepolisian;
- p) Pelacakan dan penangkalan keamanan dan ketertiban;
- q) Penanggulangan keamanan dalam negeri;

e. Program Dukungan Manajemen.

1) Tujuan

Terwujudnya *good governance* dan *clean government* melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan kemampuan manajemen dan informasi kepolisian, sinkronisasi perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi serta kerjasama lintas sektor.

2) Kegiatan

- a) Pelayanan administrasi keuangan Polri;
- b) Penerangan masyarakat;
- c) Penyelenggaraan teknologi informasi;
- d) Pelayanan kesehatan Polri;
- e) Dukungan pelayanan internal perkantoran Polri;
- f) Pertanggungjawaban profesi
- g) Penyelenggaraan pengamanan internal Polri;
- h) Penegakan tata tertib dan disiplin Polri;
- i) Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;
- j) Pengelolaan multimedia;
- k) Pemberian bantuan dan nasehat hukum;
- l) Kerjasama dan penyuluhan hukum;
- m) Penyusunan kebijakan Polri;
- n) Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri;
- o) Reformasi birokrasi Polri;
- p) Manajemen anggaran;
- q) Pengelola informasi dan dokumentasi.

**8. Pagu Ideal Polda Jambi T.A. 2024**

- a. Pagu Ideal Polda Jambi tahun 2024 sebesar Rp 1.336.153.512.000,- (Satu Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), dengan rincian komposisi kebutuhan anggaran sebagai berikut:

- 1) Rincian pagu ideal Polda Jambi T.A. 2024. per **Jenis Belanja** sebagai berikut:
  - a) Belanja pegawai: Rp. 664.221.300.000,-
  - b) Belanja Barang : Rp. 577.672.222.000,-
  - c) Belanja Modal : Rp. 94.153.512.000,-
  
- 2) Rincian Pagu Ideal T.A. 2024. Per **Sumber Anggaran** sebagai berikut:
  - a) Rupiah Murni : Rp. 1.222.872.824.000,-
  - b) PNBP : Rp. 65.380.688.000,-
  - c) BLU : Rp. 47.900.000.000,-
  
- 3) Rincian Pagu Ideal T.A. 2024. per **program** sebagai berikut:
  - a) Program Profesionalisme SDM : Rp. 22.631.031.000,-
  - b) Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Rp. 102.479.601.000,-
  - c) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp. 307.235.410.000,-
  - d) Program Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Rp. 359.462.119.000,-
  - e) Program Dukungan manajemen Rp. 544.345.351.000,-
  
- b. Kegiatan yang berdasarkan Pagu Ideal Polda Jambi T.A. 2024.
  - 1) Mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan masuk tunjangan kinerja, rekrutmen anggota Polri T.A. 2024;
  - 2) Kegiatan operasional anggaran perkantoran (antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, daya dan jasa serta keperluan perkantoran);
  - 3) Kegiatan fungsi teknis Kepolisian, berupa: deteksi potensi gangguan keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan pelayanan dan perlindungan masyarakat, terorisme, korupsi, narkoba, perdagangan orang, keamanan dalam negeri, Kamtibmas, keamanan laut, kejahatan

siber dan penegakan hukum lainnya serta untuk mendukung tercapainya proyek prioritas nasional 2024;

- 4) Penguatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Polda Jambi, penanganan gejolak sosial, penanganan kasus menonjol, separatisme/KKB, terorisme, berita hoaks dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan penanganan peristiwa yang berimplikasi kontinjensi serta pembangunan perumahan dan kesehatan bagi personel Polda Jambi;
- 5) Melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapabilitas personel Polda Jambi, baik dibidang fungsi pembinaan maupun operasional agar semakin profesional modern dan terpercaya;
- 6) Meningkatkan kegiatan preemtif dan preventif secara maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi Polmas dalam menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas;
- 7) Meningkatkan kegiatan keamanan laut pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair di tingkat kewilayahan;
- 8) Meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan gangguan Kamtibmas;
- 9) Melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi Polri serta pemberian advokasi terhadap institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polda Jambi;
- 10) Mengakomodir kegiatan Program Prioritas Kapolri.

**2. Program dan kegiatan Bidhumas Polda Jambi.**

- ((((( ( (e  
(f). Berita online  
(g). Honor narasumber diskusi publik.

**(1)** (2Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri((((((((((((((((((((444444444  
4Agustus 3

**V. PENUTUP**

Demikian Rancangan Rencana Kerja Kepolisian Dearah Jambi Tahun 2024 disusun sebagai bahan dalam menentukan langkah, kebijakan selanjutnya dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di:Jambi  
pada tanggal: Maret 2023

\_\_\_\_\_  
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Drs. RUSDI HARTONO, M.Si.  
INSPEKTUR JENDERAL POLISI